

## Kebijakan Peradilan

Kontribusi Dari Ahmad Bahri  
 Thursday, 07 June 2012  
 Pemutakhiran Terakhir Tuesday, 12 June 2012

### FATWA MAHKAMAH AGUNG RI.

- 037/KMA/II/2007 (FATWA BAHWA MAHKAMAH AGUNG HANYA MENJAWAB SURAT-SURAT YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN SENGKETA )
- 044/KMA/II/2007 (FATWA/PETUNJUK BAGI PELAKSANAAN PUTUSAN NO. 3553 K/PDT/2003 TANGGAL 28 APRIL 2005)
- 052/KMA/II/2007 (FATWA PENYERAHAN BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA)
- 065/KMA/III/2007 (FATWA PELAKSANAAN PUTUSAN NO. 356 PK/PDT/2003 ADALAH WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU DIBAWAH PENGAWASAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR SEBAGAI VOORPOST (KAWAL DEPAN) MAHKAMAH AGUNG-RI)
- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI.
  - Perma Nomor 2 tahun 2009 (BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA)
  - Perma Nomor 2 tahun 2011 (TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN)
  - Perma Nomor 3 tahun 2012 (BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA) SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI.
  - SEMA NOMOR 2 TAHUN 2009 (KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN)
  - SEMA NOMOR 4 TAHUN 2009 (PENYERAHAN / PENGIRIMAN PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN)
  - SEMA NOMOR 10 TAHUN 2009 (PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI)
  - SEMA NOMOR 13 TAHUN 2009 (PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI)
  - SEMA NOMOR 14 TAHUN 2009 (PEMBINAAN PERSONIL HAKIM) SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.
  - 001/KMA/SK/I/2012 (PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2012)
  - 009/KMA/SK/I/2012 (MUTASI HAKIM)
  - 010/KMA/SK/I/2012 (MUTASI HAKIM)
  - 017/KMA/SK/II/2012(PERUBAHAN PERTAMA SK KMA NOMOR 142/KMA/SK/IX/2011 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG)
  - 024/KMA/SK/II/2012 Tentang: PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN
  - 025/KMA/SKB/II/2012 Tentang: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN AGAMA
  - 026/KMA/SK/II/2012 Tentang: STANDAR PELAYANAN PERADILAN
  - 033A/KMA/SK/II/2012 Tentang: PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HU LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN